

Vol. 12, No. 1 Januari 2018
Hal. 131 - 144

ANALISIS PENGARUH MANAJEMEN ASET, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENDAPATAN DENGAN OPTIMALISASI ASET *IDLE* SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING* (STUDI KASUS PADA SATUAN KERJA KPKNL JEMBER)

Aan Kurniyanta

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
aan.kurniyanta@students.unej.ac.id

Ahmad Roziq

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
ahmadroziq@yahoo.com

R. Andi Sularso

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
manajemen1234@yahoo.com

Abstract: *This study aims to analyze the effect of asset management, government internal control system, and human resource competency on the revenue with idle asset optimization as the intervening variable, in the Office of State Assets and Auction Service, Jember. This study also aims to determine the best strategy for the state assets management, especially the idle asset, to increase national revenue. This is an explanatory research with applying mixed method approach using embedded concurrent model. The primary data were analyzed using Partial Least Square and descriptive analysis. The sample consists of 43 respondents collected using purposive sampling method. The results show that asset management, government internal control system, and human resource competency have no significant effects on idle asset optimization. Asset management and idle asset optimization have no significant effects on revenue, while government internal control system has a negative and significant effect on the revenue. Human resource competency has a positive and significant effect on the revenue. The results of qualitative descriptive analysis conclude that many working units did not optimally manage the asset utilization. Therefore, the right policy strategy is needed to improve idle asset optimization.*

Keywords: *Asset Management, Government Internal Control System, Human Resource Competency, Idle Assets Optimization, and Revenue.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen aset, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), terhadap pendapatan dengan optimalisasi aset *idle* sebagai variabel *intervening* pada satuan kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember. Penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan strategi terbaik dalam pengelolaan aset negara, khususnya aset *idle*, guna meningkatkan pendapatan negara. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori menggunakan metode campuran dengan model konkuren *embedded*. Data penelitian dianalisis menggunakan *Partial Least Square* dan analisis deskriptif. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan didapatkan 43 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen aset, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset *idle*. Manajemen aset dan optimalisasi aset *idle* tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan, sedangkan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan. Kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan. Hasil analisis kualitatif deskriptif menyimpulkan bahwa masih banyak satuan kerja yang belum optimal dalam pengelolaan aset karena mengalami kendala dalam pemanfaatan asetnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan optimalisasi aset *idle*.

Kata Kunci: Manajemen Aset, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi SDM, Optimalisasi Aset *Idle*, Pendapatan.

Pendahuluan

Pada saat ini masih banyak terdapat BMN yang *idle*, *under utilize* dan tidak digunakan secara efektif (DJKN, 2016). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah mengatur secara tegas bahwa BMN yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga wajib diserahkan kepada Pengelola Barang untuk dikelola dan ditatausahakan. Penatausahaan BMN *idle* oleh Pengelola Barang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga. Aset-aset yang dimiliki pada kenyataannya membuat biaya operasional dan pemeliharaan yang cukup besar, sementara kondisinya yang *idle* menyebabkan inefisiensi bagi pengelola. Program pengelolaan aset terpadu, meliputi restrukturisasi aset dan implementasi teknologi atau sistem informasi manajemen aset merupakan langkah strategis untuk ikut mendorong peningkatan pemanfaatannya (Siregar, 2002:48).

Menurut Penelitian Inarto (2013) pada satuan kerja di wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, bahwa mayoritas responden mengerti bagaimana cara memperlakukan aset *idle*, namun masih cukup banyak responden yang belum mengerti bagaimana cara memperlakukan aset yang bersifat *idle*. Sistem pengendalian intern diperlukan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas optimalisasi aset. Inarto (2013) dan Farizy (2014), menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap kinerja dan kompetensi pegawai diperlukan untuk pengelolaan aset yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh manajemen aset, SPIP dan kompetensi SDM terhadap pendapatan dan optimalisasi aset *idle* pada satuan kerja/instansi vertikal Kementerian/Lembaga (K/L) yang berada di wilayah kerja KPKNL Jember.

Manajemen aset sebagai salah satu pengukuran kemampuan manajemen satuan kerja memengaruhi optimalisasi aset *idle* yang berdampak pada pendapatan. Menurut Aira (2014), manajemen aset dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen, pemantauan, pengendalian, mengidentifikasi potensi ekonomi wilayah ini, termasuk pendapatan sumber lokal sendiri. Penelitian Ayomi (2014) dan Pekei *et al.* (2014), menjelaskan bahwa manajemen aset berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset. Berdasarkan penjelasan tersebut

maka hipotesis yang dibangun adalah Manajemen aset berpengaruh terhadap optimalisasi aset *idle*.

Menurut Magu dan Kibati (2016), penerapan sistem pengendalian intern berperan penting dalam memastikan efisiensi dan kinerja keuangan. SPIP perlu dibentuk dalam rangka menjaga agar proses optimalisasi aset berjalan dengan baik dan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Menurut Sanusi (2015) dan Uwaoma dan Ordu (2015), *internal control system* memastikan keefektifan pengelolaan aset dalam rangka optimalisasi kinerja keuangan (aset). Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang dibangun adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap optimalisasi aset *idle*.

Menurut Inarto (2013), SDM pelaksana pengelolaan aset perlu ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan. Sumber daya manusia yang tidak berkualitas akan tersingkir dan digantikan oleh sumber daya manusia yang lebih berkualitas (Aryadi, 2015). Farizy (2014), menyatakan bahwa kualitas SDM perlu ditingkatkan untuk optimalisasi aset daerah. Pekei *et al.* (2014) menyimpulkan bahwa SDM tidak berpengaruh terhadap efektifitas manajemen aset lokal, diantaranya terdapat faktor penggunaan dan utilisasi aset (optimalisasi aset). Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang dibangun adalah Kompetensi SDM berpengaruh terhadap optimalisasi aset *idle*.

Risambessy (2009), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama keuangan daerah yang biasanya berbentuk penggalan sumber dana dan kekayaan yang digali dari daerah itu sendiri. Siregar (2004:520) menyatakan bahwa penerapan konsep manajemen aset daerah memiliki ruang lingkup, diantaranya: (1) optimalisasi pendapatan asli daerah, dan (2) optimalisasi aset daerah. Penelitian Risambessy (2009) menyimpulkan bahwa manajemen aset berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian Achmad dan Hidayat (2013) juga menyimpulkan bahwa manajemen aset berhubungan dan berpengaruh terhadap profit atau pendapatan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang dibangun adalah Manajemen aset berpengaruh terhadap pendapatan.

Tandri *et al.* (2015) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern yang efektif akan memengaruhi penerimaan dan pengeluaran kas. Menurut Tandri *et al.* (2015), Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap penerimaan/pendapatan (*revenue*) dan pengeluaran kas. Magu dan Kibati (2016)

menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang dibangun adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap pendapatan.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa dalam rangka optimalisasi aset diperlukan manajemen aset yang baik dan sumber daya manusia yang handal/kompeten (Inarto, 2013). Kompetensi SDM sangat dibutuhkan setiap organisasi untuk tujuan tertentu. Untuk mencapai keberhasilan, diperlukan landasan yang kuat berupa kompetensi. Semakin berkompoten SDM suatu organisasi, kinerja akan semakin baik dan menghasilkan pendapatan tinggi maupun layanan yang semakin baik. Nguyen (2006) menyatakan bahwa kualitas SDM berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang dibangun adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap pendapatan.

Optimalisasi atas kegunaan aset yang tepat dapat menghasilkan manfaat dan pendapatan (Nugent, 2010). Natalia *et al.* (2017) menyatakan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset desa berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli desa. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang dibangun adalah Optimalisasi aset *idle* berpengaruh terhadap pendapatan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*), yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif dengan model *embedded concurrent*. Penelitian ini menggunakan cara survei dengan membagikan kuesioner kepada objek penelitian untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Skala pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) sumber data primer berupa hasil kuesioner, dan (2) sumber data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh satuan kerja K/L di wilayah kerja KPKNL Jember sejumlah 210 satuan kerja. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan didapatkan 61 sampel. Analisis data kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) dengan aplikasi *SmartPLS* 3.0. Analisis kualitatif dengan analisis deskriptif.

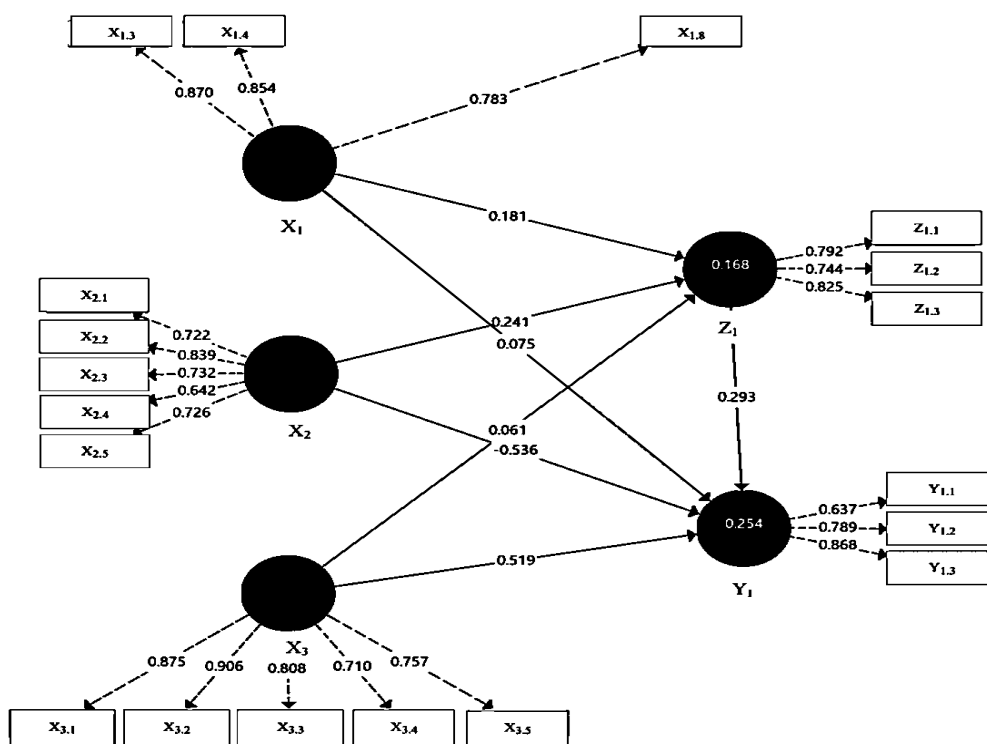
Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Dari 61 kuesioner yang diedarkan dan hanya 43 kuesioner yang dapat diolah. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah pejabat eselon IV (74,42%), dengan kebanyakan responden memiliki masa kerja jabatan antara 1 sampai dengan 5 tahun (72,09%) dan berpendidikan Sarjana/Diploma IV (79,07%) dengan usia di atas 50 tahun (62,79%). Responden penelitian secara umum memiliki manajemen aset yang baik (tinggi), memiliki manajemen aset yang baik dalam pengelolaan asetnya, memiliki sistem pengendalian intern pemerintah yang baik (tinggi), memiliki kompetensi sumber daya manusia yang tinggi, sudah melakukan pengelolaan aset (*idle*) sudah secara optimal (tinggi), namun memiliki pendapatan rendah dari pengelolaan aset yang dimilikinya.

Convergent Validity

Penelitian ini menggunakan batas *loading factor* sebesar 0,60 karena dalam tahap pengembangan skala, *loading* 0,50 sampai dengan 0,60 masih dapat diterima (Ghozali, 2014:61). Gambar 3.1 menunjukkan model kedua dengan *loading factor* untuk masing-masing konstruk lebih dari 0,60 dan signifikan pada 0,05 (5%), maka telah memenuhi uji *convergent validity*.



Gambar 3.1 Hasil output grafik pada SmartPLS

Discriminant Validity

Hasil uji *discriminant validity* menunjukkan setiap nilai *loading* masing-masing indikator variabel laten memiliki nilai *loading* yang lebih besar dibandingkan dengan nilai *loading* masing-masing indikator dari setiap variabel laten lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa model memiliki *discriminant validity* yang baik.

Uji Reliability dan Average Variance Extracted (AVE)

Konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika nilai CR $\geq 0,70$ dan nilai AVE $> 0,50$. Berdasarkan Tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memenuhi kriteria reliabel.

Tabel 3.1 Composite reliability dan average variance extracted

Variabel	CR	AVE	\sqrt{AVE}
Manajemen Aset (X_1)	0,875	0,700	0,837
SPIP (X_2)	0,854	0,540	0,735
Kompetensi SDM (X_3)	0,907	0,663	0,814
Optimalisasi Aset <i>Idle</i> (Z_1)	0,812	0,594	0,771
Pendapatan (Y_1)	0,830	0,620	0,787

Sumber: *SmartPLS Report*, diolah.

Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Tabel 3.2 menunjukkan nilai *R-square*. *Q-Square* (Q^2) *predictive relevance* dari model struktural digunakan untuk mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya dihitung dengan rumus:

$$Q^2 = 1 - (1 - R_1^2) (1 - R_2^2) = 1 - (1 - 0,254) (1 - 0,168) = 0,379$$

Tabel 3.2 Nilai *R-square*

Variabel Dependenden	R ²
Optimalisasi Aset <i>Idle</i> (Z_1)	0,254
Pendapatan (Y_1)	0,168

Sumber: bootstrapping results

Nilai $Q^2 > 0$, berarti bahwa model memiliki *predictive relevance*. Menurut Stone Geisser nilai Q^2 : 0,02 (kecil), 0,15 (sedang), dan 0,35 (besar). Nilai *Q-Square* dalam penelitian ini 0,379 (besar) yang berarti bahwa model persamaan struktural yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebesar 37,90% dan sisanya sebesar 62,10% dijelaskan oleh faktor lain diluar model.

Uji Signifikansi dan Pengaruh Antar Variabel

Tabel 3.3 memberikan hasil *estimasi* untuk pengujian model struktural dengan menggunakan simulasi dengan metode *resampling bootstrap*. Jika t-hitung $>$ t-tabel

(2,017) dan p -value < 0,05 (5%) maka hipotesis diterima, jika sebaliknya maka hipotesis ditolak.

Tabel 3.3 Output path coefficients

Indikator	T-Statistics (O/STDEV)	P Values	Keputusan
$H_1 : X_1 \rightarrow Z_1$	1,044	0,297	Tidak Signifikan
$H_2 : X_2 \rightarrow Z_1$	0,906	0,366	Tidak Signifikan
$H_3 : X_3 \rightarrow Z_1$	0,203	0,839	Tidak Signifikan
$H_4 : X_1 \rightarrow Y_1$	0,283	0,777	Tidak Signifikan
$H_5 : X_2 \rightarrow Y_1$	2,130	0,034	Signifikan
$H_6 : X_3 \rightarrow Y_1$	2,297	0,022	Signifikan
$H_7 : Z_1 \rightarrow Y_1$	1,452	0,147	Tidak Signifikan

Sumber: bootstrapping results, diolah.

Kendala Dalam Pemanfaatan Barang Milik Negara

Berdasarkan atas jawaban responden yang berkaitan dengan informasi terkait optimalisasi aset, dapat diketahui bahwa pengelolaan aset pada 27 satuan kerja telah optimal, sedangkan 16 satuan kerja belum optimal. Satuan kerja mengalami kesulitan dalam pemanfaatan aset, antara lain: (1) Proses birokrasi yang memakan waktu lama; (2) Respon dari Pengguna Barang (Pusat K/L) terkait permohonan izin pemanfaatan BMN yang sangat lama; (3) Kesulitan dalam penentuan tarif sewa; (4) Aturan tentang pemanfaatan aset yang ada tidak mengakomodir; (5) Terdapat aset berupa peralatan dan mesin rusak berat yang hilang; (6) Terdapat aset yang sering pindah ruangan/tempat; (7) Aplikasi pengelolaan BMN yang sering *update*; (8) Lambatnya proses transfer arsip data komputer (ADK) dari kantor pusat K/L; (9) Pergantian operator SIMAK BMN; (10) Jumlah SDM yang terbatas dan/atau kurang memahami tentang pengelolaan BMN; (11) Beberapa peralatan dan mesin yang bernilai besar, sedangkan pemeliharaannya harus dilelang dan membutuhkan pihak luar (*manufacture*); (12) Terdapat satuan kerja yang mempunyai BMN yang tersebar di beberapa wilayah, sehingga mempersulit proses identifikasi, pemeliharaan serta pengawasan dan pengendaliannya; (13) Biaya pemeliharaan yang rendah; (14) Terbatasnya anggaran dalam pengelolaan BMN; (15) Rantai birokrasi dalam pengelolaan BMN yang membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang terlalu lama; dan (16) Klasifikasi barang tidak ada patokan yang jelas.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian koefisien jalur pada Tabel 3.3 dan hasil penelitian pada bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut:

- a. Variabel manajemen aset ternyata berpengaruh secara tidak signifikan terhadap variabel optimalisasi aset *idle* dengan koefisien sebesar 0,181 namun tidak signifikan dengan t-hitung sebesar 1,044. Hal tersebut berarti bahwa hipotesis pertama **ditolak**. Hal ini disebabkan variabilitas manajemen aset tidak mampu memengaruhi variabilitas optimalisasi aset *idle* secara proporsional. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyebutkan bahwa BMN *idle* wajib diserahkan kepada Pengelola Barang untuk dikelola dan ditatausahakan. Hal inilah yang menyebabkan manajemen aset pada satuan kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap optimalisasi aset *idle*. Keterlibatan satuan kerja dalam pengelolaan aset *idle* menjadi terbatas atau sangat kecil;
- b. Variabel SPIP ternyata berpengaruh secara tidak signifikan terhadap variabel optimalisasi aset *idle* dengan koefisien sebesar 0,241 namun tidak signifikan dengan t-hitung sebesar 0,906. Hal tersebut berarti bahwa hipotesis kedua **ditolak**. Hal ini disebabkan variabilitas SPIP tidak mampu memengaruhi variabilitas optimalisasi aset *idle* secara proporsional. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyebutkan bahwa BMN *idle* wajib diserahkan kepada Pengelola Barang untuk dikelola dan ditatausahakan. Hal inilah yang menyebabkan SPIP pada satuan kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap optimalisasi aset *idle*. Keterlibatan satuan kerja dalam pengelolaan aset *idle* menjadi terbatas atau sangat kecil. Pengawasan yang pada awalnya menjadi tanggung jawab satuan kerja, menjadi tanggung jawab pengelola barang;
- c. Variabel kompetensi SDM ternyata berpengaruh secara tidak signifikan terhadap variabel optimalisasi aset *idle* dengan koefisien sebesar 0,061 namun tidak signifikan dengan t-hitung sebesar 0,839. Hal tersebut berarti bahwa hipotesis ketiga **ditolak**. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyebutkan bahwa *idle* wajib diserahkan kepada Pengelola Barang untuk dikelola dan ditatausahakan. Satuan kerja selaku pengguna barang, lebih mengetahui jumlah dan kondisi sebenarnya atas aset *idle*. Hal inilah yang menyebabkan kompetensi SDM pada satuan kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap optimalisasi aset *idle*. Keterlibatan satuan kerja dalam pengelolaan aset *idle* menjadi terbatas atau sangat kecil. Aset *idle* yang pada awalnya dikelola secara langsung oleh satuan kerja, menjadi tanggung jawab pengelola barang. Satuan kerja seharusnya tetap dilibatkan dalam optimalisasi aset *idle*, mengingat SDM pengelola barang saat ini sangat terbatas.

- d. Variabel manajemen aset ternyata berpengaruh secara tidak signifikan terhadap variabel pendapatan dengan koefisien sebesar 0,075 namun tidak signifikan dengan t-hitung sebesar 0,777. Hal tersebut berarti bahwa hipotesis keempat **ditolak**. Hal ini disebabkan variabilitas manajemen aset tidak mampu memengaruhi variabilitas pendapatan secara proporsional. Hal ini disebabkan karena satuan kerja KPKNL Jember merupakan organisasi sektor publik yang *service oriented*, sehingga berbeda dengan perusahaan atau organisasi sektor privat lainnya yang *profit oriented*. Aset satuan kerja pada saat ini lebih banyak digunakan untuk pelayanan publik, bukan dikelola untuk mendatangkan pendapatan. Hal tersebut menyebabkan manajemen aset berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan;
- e. Variabel SPIP ternyata berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pendapatan dengan koefisien sebesar -0,536 dan signifikan dengan t-hitung sebesar 2,130. Hal tersebut berarti bahwa hipotesis kelima **diterima**. Hubungan ini menunjukkan bahwa semakin baik SPIP akan memengaruhi pendapatan semakin rendah. Sebaliknya semakin buruk SPIP akan menyebabkan pendapatan semakin tinggi. SPIP yang terlalu ketat menyebabkan masyarakat enggan untuk menginvestasikan modalnya untuk pemanfaatan aset pemerintah, sehingga menurunkan pendapatan dari pemanfaatan aset pemerintah;
- f. Variabel kompetensi SDM ternyata berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pendapatan dengan koefisien sebesar 0,519 dan signifikan dengan t-hitung sebesar 2,297. Hal tersebut berarti bahwa hipotesis keenam **diterima**. Hubungan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi SDM akan memengaruhi pendapatan semakin tinggi, dan sebaliknya;
- g. Variabel optimalisasi aset *idle* ternyata berpengaruh secara tidak signifikan terhadap variabel pendapatan dengan koefisien sebesar 0,293 namun tidak signifikan dengan t-hitung sebesar 1,452. Hal tersebut berarti bahwa hipotesis keenam **ditolak**. Hal ini disebabkan karena satuan kerja KPKNL Jember merupakan organisasi sektor publik yang *service oriented*, sehingga berbeda dengan perusahaan atau organisasi sektor privat lainnya yang *profit oriented*. Aset *idle* saat ini masih diutamakan untuk digunakan/diserahkan kepada satuan kerja yang membutuhkan. DJKN yang diharapkan menjadi *revenue center* melalui pengelolaan aset, masih belum dapat mengelola aset *idle* dalam rangka

meningkatkan penerimaan negara (pendapatan). Hal tersebut menyebabkan optimalisasi aset *idle* berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan;

- h. Secara teoritis nampak jelas bahwa manajemen aset dan sistem pengendalian internal yang baik merupakan hal-hal yang ideal untuk dapat mencapai optimalisasi aset *idle*. Namun dalam prakteknya sulit diterapkan karena banyak kendala serta membutuhkan kondisi yang ideal seperti SDM yang cukup dan berkompentensi tinggi, adanya peraturan yang mendukung dan strategi terbaik dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset. Strategi kebijakan yang perlu diterapkan pemerintah dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi dalam optimalisasi aset *idle* antara lain: (1) Perlu adanya sosialisasi kepada Pengguna Barang (satuan kerja) mengenai pengelolaan BMN *idle*, sehingga benar-benar jelas dan dipahami; (2) Mewajibkan setiap satuan kerja/instansi untuk melaporkan aset *idle* ke pengelola barang sesuai dengan wilayah kerjanya, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap satuan kerja yang lalai; (3) Bekerja sama dengan satuan kerja dalam identifikasi (pendataan) secara berkala terhadap BMN *idle* yang ada di setiap K/L; (4) Merumuskan kebijakan dan peraturan yang sesuai untuk aset-aset khusus yang tidak terakomodir dalam peraturan umum yang sudah ada; (5) Menyewakan BMN *idle* sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; (6) Mempermudah syarat pemanfaatan aset negara; (7) Menentukan tarif sewa sesuai peraturan yang berlaku; (8) Menumbuhkan rasa peduli kepada pegawai agar ikut serta membantu meningkatkan pemanfaatan aset; (9) Mempublikasikan aset *idle* melalui media elektronik dan media cetak, untuk ditawarkan pemanfaatannya kepada pihak ketiga; (10) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai aset *idle* dan pemanfaatannya; (11) Penggunaan tenaga profesional untuk mengelola BMN *idle*; dan (12) Mengalihkan (hibah) BMN *idle* kepada pihak/instansi lain yang lebih membutuhkan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Manajemen aset, SPIP, dan kompetensi SDM berpengaruh secara tidak signifikan terhadap optimalisasi aset *idle* pada satuan kerja/instansi vertikal kementerian/lembaga di wilayah kerja KPKNL Jember;

- b. Manajemen aset dan optimalisasi aset *idle* berpengaruh secara tidak signifikan terhadap pendapatan pada satuan kerja/instansi vertikal kementerian/lembaga di wilayah kerja KPKNL Jember;
- c. Variabel SPIP berpengaruh negatif secara signifikan terhadap variabel pendapatan pada satuan kerja/instansi vertikal kementerian/lembaga di wilayah kerja KPKNL Jember;
- d. Variabel kompetensi SDM berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel pendapatan pada satuan kerja/instansi vertikal kementerian/lembaga di wilayah kerja KPKNL Jember;
- e. Berdasarkan temuan atas analisis kualitatif deskriptif, menunjukkan bahwa terdapat banyak kendala dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset pada satuan kerja KPKNL Jember. Pemerintah melalui DJKN harus mampu mengatasi kendala-kendala tersebut untuk meningkatkan optimalisasi aset *idle* dalam rangka meningkatkan pendapatan dengan strategi kebijakan yang dapat meningkatkan manajemen aset yang baik dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai dan berkompeten.

Saran

Berdasarkan analisis hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, beberapa saran yang menjadi implikasi dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagi Satuan Kerja KPKNL Jember: (1) Manajemen satuan kerja harus mampu mengambil tindakan untuk meningkatkan efektifitas pengendalian intern dalam pengelolaan dan pemanfaatan asetnya; (2) Manajemen satuan kerja perlu melakukan peningkatan sumber daya pengelola asetnya melalui pendidikan dan pelatihan.
- b. Bagi KPKNL Jember: (1) Kebijakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dan pemanfaatan aset perlu dijalankan dengan baik agar praktek pengelolaan dan pemanfaatan aset tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku; (2) Kebijakan peningkatan kompetensi SDM pengelola BMN terus dilakukan terhadap satuan kerja di wilayah kerjanya, agar manajemen aset satuan kerja menjadi lebih baik.
- c. Bagi Periset Lain: (1) Hasil penelitian ini dapat dikembangkan oleh periset lain dengan cara memperluas lokasi penelitian, memperbanyak sampel penelitian dan variabel penelitian; (2) Peneliti lain perlu melibatkan kepala satuan kerja

sebagai responden dalam memberikan informasi data yang dianalisis, sehingga mampu menyempurnakan dan memperkaya hasil penelitian ini; (3) Penelitian yang selanjutnya sebaiknya menggunakan referensi jurnal penelitian yang sesuai.

Daftar Referensi

- Achmad, N. dan Hidayat, L.. 2013. Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, Vol.1 No.1, 2013, pp.23-38, ISSN 2337-7860.
- Aira, A.. 2014. Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 17 Januari-Juni 2014.
- Aryadi, A.Y.. 2015. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pustakawan Di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Ayomi, E.S.. 2014. Pengaruh Manajemen Aset Tetap Terhadap Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten Manokwari). *Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
- DJKN. 2016. *Menkeu: DJKN Harus Menjadi Revenue Center*. Berita DJKN. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/detail/menkeu-djkn-harus-menjadi-revenue-center>. [Diakses pada 12 Oktober 2016].
- Farizy, Salman. 2014. Manajemen Aset Dalam Pengelolaan Aset (Tanah dan Bangunan) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu Tahun 2014. *Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
- Ghozali, Imam. 2014. *Struktur Equation Modeling: Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Inarto, Koko. 2013. Analyzing Implementation of State Asset Management Reform Policy in Indonesia (A Case Study on Surabaya State Asset and Auction Service Office, East Java Province). *Tesis*. Malang: Linkage Master Program Faculty of Administration Science, Brawijaya University - Ritsumeikan University Graduate Schools.
- Magu, J. K. dan Kibati, P.. 2016. Influence of Internal Control Systems on Financial Performance of Kenya Farmer's Association Limited. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, Vol.IV, Issue 4, April 2016, ISSN 2348 0386.
- Natalia, Y.S., *et al.*. 2017. Pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pendapatan Asli Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Tabanan). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 07, No.01 Tahun 2017.
- Nguyen, T.M.A.. 2008. *Functional competencies and their effects on performance of manufacturing companies in Vietnam*. Tesis, Faculty of Economics and Social Sciences, University of Fribourg, Switzerland.
- Nugent, S.. 2010. The Asset Journal. *Management Council Inc*. Journal of Management Asset, 4.
- Pekei, B., *et al.*. 2014. The Effectiveness of Local Asset Management (A Study On The Government Of Jayapura). *International Journal of Business and Management Invention*, Volume 3, Issue 3, Maret 2014, ISSN (Online): 2319 – 8028, ISSN (Print): 2319 – 801X.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014. *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. 24 April 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.06/2016. *Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Tang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga*. 27 April 2016. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 644. Jakarta.
- Risambessy, R.I.. 2009. Analisis Manajemen Aset Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, Volume 6, Nomor 1, Oktober 2009.
- Sanusi, Z.M., *et al.*. 2015. The Affects of Internal Control System, Financial Management and Accountability of NPOs: The Perspective of Mosques in Malaysia. *Procedia Economics and Finance Journal*, Vol.28, pp 156-162.
- Siregar, D.D.. 2002. *Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siregar, D.D.. 2004. *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai Ceo's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tandri, M., *et al.*. Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan dan Pengeluaran Kas di RSUD Pancaran Kasih GMIM Manado. *Jurnal EMBA*, Vol.3, No.3, September 2015, Hal.208-218.
- Uwaoma, I. dan Ordu, P.A.. 2015. The Impact of Internal Controls on Financial Management: A Case of Production Companies in Nigeria. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, Vol.III, Issue 12, Desember 2015, ISSN 2348 0386.